

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andenaes, Johannes, 1966, *The General Preventive Effects Of Punishment*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 114 No.7.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Ismail, Nurhasan. "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya". *Majalah Berkala Mimbar Hukum Edisi Khusus No.44/VI/2003*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Judisseno, Rimsky K. 2005, *Pajak & Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Johnson, Doyle Paul, 1988, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, PT Gramedia, Jakarta.
- Marpaung, Leden *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawawi Arif, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya , Bakti, Bandung.

- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Soemitro, Rochman, dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Tax Enciclopedia. 2016 *Indonesian Tax Review*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Wahono, Sugeng, 2012, *Mengurus Pajak itu Mudah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yudha Bhakti, 2012, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Sistem Hukum Pajak Indonesia*, Fikahati aneska bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

B. Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, EKONOMI. Pajak. Pengampunan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988).
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tanggal 14 Mei 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tanggal 14 Mei 2012 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyeteroran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tanggal 3 Juli 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

C. Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, Maret 2013, Ed. IV, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

D. Artikel Internet

Ardan Adhi Chandra, “Rasio Pajak RI Masih yang Terendah”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3739567/sri-mulyani-rasio-pajak-ri-masih-yang-terendah>, di akses tanggal 5 Februari 2018.

Berpendidikan, “Teori Kepatuhan Terhadap Hukum dan Norma” <http://www.berpendidikan.com/2016/11/3-teori-kepatuhan-terhadap-hukum-dan-norma.html> diakses pada tanggal 9 November 2016.

Budi, Chandra, “Penegakan Hukum Versus Tax Amnesty”, <http://id.beritasatu.com/home/penegakan-hukum-versus-tax-amnesty/146562> diakses tanggal 4 Juli 2017.

Direktorat Jenderal Pajak, “Pengemplang Pajak Tidak Bisa Kabur”, <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-aeoi-program-yang-membuat-pengemplang-pajak-tidak-bisa-kabur> diakses pada tanggal 17 November 2017

Harvelian, Agnes, “Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia”, https://www.researchgate.net/publication/322130949_IMPLIKASI_HUKUM_DAN_LEGALITAS_TAX_AMNESTY_TERHADAP_TINGKAT_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_DI_INDONESIA, di akses tanggal 5 Februari 2018.

Republika Edisi Kamis 17 Mei 2016, *Pro dan Kontra Tax Amnesty*, Surat Kabar Republika.

Syamsudin, “*Amnesti Pajak*” Dago Bandung Jawa Barat, diakses hari senin tanggal 8 Agustus 2016.